

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “peran” mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “guru” diartikan sebagai orang yang tugasnya mendidik dan mengajar. Pada dasarnya kata “guru” berasal dari bahasa Sanskerta dan secara harfiah berarti “berat” dan merupakan ilmu tentang seorang guru. Tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pada kelas VII mengacu pada Lembar Kinerja Siswa (LKS), hampir semua guru menggunakan metode ceramah dan mengerjakan soal. Oleh karena itu siswa menjadi bosan dan tidak mendengarkan penjelasan guru selama pembelajaran sehingga mengganggu sikap siswa terhadap guru dan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Dalam hal ini menunjukkan kurangnya toleransi siswa terhadap guru.

Sikap toleransi menurut (Nuriadi Hulu, 2023:2) sikap adalah positif orang terhadap individu dan kelompok lain, seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya. Toleransi karena itu berarti menghormati individu dan perbedaan mereka, mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan menghilangkan stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama dan asal usul. Serta saling menghormati satu sama lain melalui pengertian dan tidak bertentangan dengan semboyan bangsa

Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

Guru diharapkan mampu membentuk atau mengembangkan karakter siswa. Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis dalam buku, tetapi juga perubahan sikap peserta didik. Sikap toleransi ini harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Tidak ada jaminan siswa yang lulus ujian kewarganegaraan yang baik akan memiliki sikap toleransi yang baik (Siti Fatonah, 2022:183). Oleh karena itu, guru PPKn berperan penting dalam mengembangkan kecerdasan dan karakter siswa dan harus memiliki strategi yang baik untuk menerapkan konten yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Kasmudin Harahap dkk, 2023:36) Pancasila dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan profesi yang mengemban tanggung jawab besar untuk membantu peserta didik berkembang baik secara fisik maupun mental, berhasil dalam bidang akademik dan non akademik serta menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, guru memiliki tugas dan wewenang untuk menanamkan dalam diri anak didiknya sikap toleransi yang baik terhadap guru dan teman sebayanya.

Toleransi menurut (Aryanti Dwiyani, 2021:3) berarti kebiasaan atau sikap menghormati, membiarkan dan menerima pandangan (pendapat, keyakinan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat sendiri.

Toleransi adalah sikap atau sifat yang diperbolehkan oleh orang lain secara sukarela dan yang diusulkan kebenaran tentang perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak asasi manusia (Afifah, 2019:4). Oleh karena itu, toleransi sangat penting agar setiap orang dapat mengembangkan sikap hormat dan hormat kepada guru selama pembelajaran.

Toleransi ini untuk menjalankan dukungan Pancasila semaksimal mungkin dan pastikan hubungan baik antar warga negara Indonesia. Toleransi siswa berarti kebebasan beragama kepada orang lain menurut Pasal 29 UUD 1945. Dengan toleransi siswa menciptakan kerukunan antar siswa apabila toleransi dilaksanakan dengan baik. Selain itu, toleransi antar siswa berarti saling menghargai dan pergaulan yang menghargai agama. Jadi toleransi bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, tetapi juga kemurnian ajaran agama harus dijaga.

Pembelajaran PPKn dari (Qonita Al-Ishmah, dkk, 2023:32) beliau memiliki visi dan misi, yaitu: Penanaman nilai, moral dan standar secara utuh dan berkesinambungan menjadi tujuan PPKn untuk membentuk karakter warga negara yang baik atas nama mereka yang mengetahui, menginginkan dan mengetahui hak dan kewajibannya. Pembelajaran sosial yang aktif dan efektif adalah baik apabila pembelajaran tersebut juga didukung oleh bahan ajar yang ahli, sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan materi yang disajikan dapat dipahami dan dapat diterapkan oleh siswa tersebut.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Hasaniyah dipilih sebagai tempat penelitian karena pengalaman peneliti dalam program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan berbasis pondok pesantren dibawah naungan Kementerian Agama, berlokasi di Gang Pesantren No.35 Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Siswa kelas VII dipilih karena peneliti pada saat program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) diberi kesempatan untuk mengajar pada kelas tersebut. Oleh karena itu, peneliti dapat mengetahui bagaimana cara belajar dan karakter siswa kelas VII dalam bersikap terhadap guru maupun temannya.

Siswa di MTs Raudlatul Hasaniyah kelas VII, kurang menghargai guru hal ini ditunjukkan dengan mereka membuat kegaduhan pada saat pembelajaran berlangsung, ketika belajar antar sesama temannya kurang menghargai pendapat teman lainnya, ketika berbicara dengan guru dan temannya menggunakan kalimat yang tidak baik dan tidak rapi dalam menggunakan seragam atau atribut sekolah. Berdasarkan beberapa indikator di atas, peran guru Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diperlukan sebagai solusi untuk menanamkan sikap toleran di sekolah dan agar siswa kelas VII mengalami perubahan sikap toleransi.

Oleh karena itu, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa siswa kelas VII masih belum memiliki toleransi yang baik. Dengan peran guru sebagai pendidik dapat mengajarkan sikap toleransi yang baik kepada anak didiknya melalui pembelajaran PPKn. Latar belakang diatas peneliti tertarik

mengambil judul “PERAN GURU DALAM MENANAMKAN SIKAP TOLERANSI SISWA MELALUI PEMBELAJARAN PPPKN KELAS VII DI MTs RAUDLATUL HASANIYAH”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru dalam menanamkan toleransi pada siswa melalui pembelajaran PPKn VII MTs Raudlatul Hasaniyah?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat guru dalam mengajarkan toleransi pada siswa kelas VII PPKn MTs Raudlatul Hasaniyah?
3. Bagaimana solusi guru untuk menanamkan sikap toleransi pada PPKn Kelas VII MTs Raudlatul Hasaniyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Deskripsi peran guru dalam menanamkan toleransi pada siswa melalui pembelajaran PPKn Kelas VII di MTs Raudlatul Hasaniyah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat guru dalam mengajarkan toleransi pada siswa belajar PPKn Kelas VII di MTs Raudlatul Hasaniyah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mempengaruhi kualitas sekolah karena kemampuan guru dalam melaksanakan tugas secara profesional.
2. Guru dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengontrol proses pembelajaran, melakukan refleksi pemahaman tentang keterbatasan dan masalah, serta memecahkan masalah pembelajaran.
3. Siswa dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya toleransi.

1.5 Konfirmasi Persyaratan

Untuk mengkonfirmasi kondisi penelitian ini, termasuk:

1.5.1 Peran Guru

Menurut (Fauzie, *dkk*, 2021:211) peran guru dalam pembelajaran mencerminkan untuk belajar mandiri tidak luput dari fokus pada pengembangan karakter siswa di sekolah, peran guru menjadi figur sentral dalam pelaksanaan inisiatif tersebut, yang dapat mempengaruhi pengajaran mata pelajaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa guru dapat menginspirasi dan memotivasi siswanya dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, bahasa yang baik dan kepribadian yang bermoral.

1.5.2 Sikap Toleransi

Menurut (Khoiril Anam, 2022:13) toleransi adalah cara atau sikap menghargai, menghargai dan membiarkan pendapat,

pandangan, kepercayaan, adat istiadat, perilaku, dan lain-lain, yang berbeda dengan diri sendiri.

1.5.3 Pembelajaran PPKn

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup materi tentang nilai norma dan aturan yang memandu perilaku sosial. Cakupan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2) standar, hukum dan peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) kebutuhan warga negara; (5) konstitusi negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) pancasila; (8) Globalisasi (Hodriani, 2023:3).